

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pendekatan *Kognitif Theory*

Menurut Iskandar (2012), *kognitif* merupakan proses sentral atau proses mental yang mengantarai peristiwa-peristiwa yang terjadi di luar diri seseorang dengan yang terjadi di dalam diri manusia. Perubahan lingkungan lama menjadi baru, sudah barang tentu berpengaruh pada manusianya. Seseorang dalam hal ini akan menerima informasi baru tentang perubahan-perubahan lingkungannya, sehingga ia harus memikirkan penyesuaian dirinya. Oleh karenanya, ia akan melakukan evaluasi tentang lingkungan baru tersebut. Dia akan merasa senang atau susah dengan adanya perubahan lingkungan baru tersebut.

Informasi mengenai perubahan lingkungan akan diolah pada diri manusia ketika berinteraksi dengan lingkungannya. Pembangunan lingkungan baru akan berakibat pada perubahan peta *kognitif* yang dimiliki seseorang. Seseorang yang sudah terbentuk peta *kognitifnya* pada lingkungan lama, maka perubahan lingkungan tersebut akan membuat peta *kognitifnya* tidak jelas. Sebagai akibat dari perubahan lingkungan akan memberikan ketidaknyamanan dan dirinya merasa kurang senang.

Perubahan lingkungan yang kurang disosialisasikan bisa dapat menimbulkan berbagai permasalahan pada kelompok atau individu yang berusaha untuk beradaptasi dengan lingkungan tersebut. Hal ini terjadi karena pola tingkah laku setiap harinya sudah terbentuk dengan lingkungan yang ada, sehingga hal tersebut sudah menjadi kebiasaan. Akibatnya, orang-orang akan merasa berat beradaptasi terhadap rancangan perubahan yang akan terjadi.

Nilai atau objek akan memiliki arti tertentu bagi seseorang. Nilai merupakan elemen yang turut menentukan dalam memberikan makna bagi seseorang mengenai objeknya. Nilai suatu objek tidak harus berupa harga, tetapi nilai dapat merupakan makna tertentu bagi seseorang.

Individu atau kelompok juga selalu mempertimbangkan dampak dari perubahan yang mereka dapatkan. Jika berpengaruh positif, mereka akan menerima. Sebaliknya, jika tidak sesuai yang mereka harapkan akan memicu munculnya penentangan. Pertimbangan akan berpengaruh positif atau negatif inilah yang nantinya mempengaruhi individu atau masyarakat untuk mendukung perubahan atau tidak.

Faktor lain yang mempengaruhi dukungan individu atau masyarakat terhadap perubahan adalah pengetahuan mereka terhadap perubahan tersebut. Kurangnya pengetahuan terhadap perubahan yang akan terjadi akan membuat orang merasa kurang kendali atas perubahan yang terjadi. Pengetahuan tentang perubahan akan memberikan gambaran kepada orang-orang sejauh mana mereka bisa mengendalikan pengetahuan tersebut. Oleh karena itu, faktor partisipatif dalam perencanaan akan sangat berpengaruh. Jika masyarakat dilibatkan dalam perencanaan, turut dilibatkan dalam merancang perubahan, mereka akan merasa memiliki tanggungjawab untuk menyukseskan perubahan tersebut karena munculnya rasa kepemilikan terhadap rancangan perubahan tersebut. Sebaliknya, jika masyarakat merasa tidak dilibatkan, kognisi masyarakat tentang lingkungannya cenderung masih tetap seperti belum ada perubahan, sehingga mereka tetap bertingkah laku seperti biasanya.

Scheerer dalam Iskandar (2012) menyatakan bahwa persepsi merupakan representasi fenomena objek distal yang terorganisasi, media, dan stimulus proksimal, kemudian disimpulkan mengenai fenomena yang terorganisasi tersebut. Di dalam persepsi tersebut terjadi proses pemberian makna atau arti tentang objek yang dihadapi oleh orang yang mempersepsi. Proses persepsi terdapat dalam komponen *kognitif*. Tetapi di dalam proses persepsi dapat saja terjadi perbedaan pemaknaan antara satu orang dengan orang yang lain. Proses persepsi mempunyai peran dalam pembentukan pemetaan *kognitif*. Proses pemberian makna akan terjadi pada persepsi tentang lingkungan yang diamatinya.

Pendekatan *kognitif* menarik minat peneliti karena dengan adanya perubahan yang dulunya menggunakan *cash basic* menuju *full accrual* secara langsung akan berdampak pada persepsi aparatur pemerintah daerah selaku objek dalam

pemberlakuan aturan tersebut. Oleh karena itu, diperlukannya penyesuaian dalam mepersepsikan sistem pencatatan *accrual basis* untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja pegawai pemerintah daerah.

2.2 Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

2.2.1 Pengertian Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Standar akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian, SAP meruokan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. SAP ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Sesuai dengan amanat Undang-undang tersebut maka disusunlah suatu SAP yang ditetapkan Presiden sebagai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (PP SAP) tertanggal 13 Juni 2005. Setiap entitas pelaporan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah wajib untuk menerapkan SAP.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan, serta peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah. Laporan keuangan pemerintah tersebut terdiri atas laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) dan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD). (www.wikiapbn.com)

Seperti dalam organisasi *profit*, para pengambil keputusan dalam organisasi pemerintah pun membutuhkan informasi untuk mengelola organisasi yang dijelankannya. Selain sebagai dasar dalam pengambilan keputusan, informasi juga dapat digunakan sebagai alat komunikasi dan pertanggungjawaban pengelolaan organisasi terhadap pihak lain (Siregar, 2015). Oleh karena itu pemerintah memerlukan suatu standar akuntansi di bidangnya tersendiri dalam menjalankan aktivitas layanan kepada masyarakat luas. Dengan ditetapkannya PP SAP, maka pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah memiliki suatu pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip yang

berlaku secara internasional. Hal ini menandai dimulainya suatu era baru dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD dalam rangka memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas.

SAP diterapkan di lingkungan pemerintahan, baik pemerintah pusat dan kementerian-kementriannya maupun di pemerintah daerah (pemda) dan dinas-dinasnya. Penerapan SAP diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan di pemerintah pusat dan daerah. Ini berarti informasi keuangan pemerintahan akan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan di pemerintahan dan juga terwujudnya transparansi, serta akuntabilitas.

2.2.2 Manfaat Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Menurut Fakhruzaki (2010) manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya standar akuntansi pemerintahan adalah laporan keuangan yang dihasilkan dapat memberikan informasi keuangan yang terbuka, jujur, dan menyeluruh kepada *stakeholders*. Selain itu, dalam lingkup manajemen dapat memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas asset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah. Manfaat selanjutnya adalah keseimbangan antar generasi, dimana dapat memberikan informasi mengenai kecukupan penerimaan pemerintah untuk membiayai seluruh pengeluaran dan apakah generasi yang akan datang ikut menanggung beban pengeluaran tersebut. Laporan keuangan yang dihasilkan juga dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan sumber daya dalam mencapai tujuan.

2.3 Sistem Pencatatan

Penerapan sistem akuntansi untuk pemerintahan di Indonesia telah dilakukan dengan baik di Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah telah melakukan pelaporan keuangan yang mengacu pada sistem manual akuntansi keuangan daerah yang berbasis kas. Sistem ini telah mengakomodasi kepentingan manajemen pemerintah daerah, namun gagal memenuhi tuntutan akuntabilitas publik.

Berkaitan dengan pelaksanaan APBD sekaligus menjawab tuntutan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah maka diperlukan suatu sistem akuntansi keuangan daerah yang mampu memperbaiki kelemahan sistem akuntansi yang ada saat ini

Pada dasarnya sistem akuntansi keuangan daerah dirancang dengan tujuan :

- a. Menghasilkan informasi keuangan yang akurat, dapat diandalkan, tepat waktu, dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan.
- b. Meningkatkan Akuntabilitas Pemerintah Daerah baik secara Internal maupun Eksternal.
- c. Meningkatkan pengendalian Intern.
- d. Memenuhi ketaatan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Oleh karena itu, untuk dapat mengimplementasikan lampiran keuangan sebagaimana yang diamanatkan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini dibutuhkan sistem pembukuan Berbasis Akrual Penuh (*full accrual basis*).

2.3.1 Akuntansi Basis Kas dan Basis Akrual

2.3.1.1 Akuntansi Berbasis Kas

Basis kas merupakan pencatatan transaksi ekonomi hanya apabila transaksi tersebut menimbulkan perubahan pada kas, Halim dan Syam (2011). Sedangkan menurut Bastian (2009) basis kas adalah mengakui dan mencatat transaksi keuangan pada saat kas diterima atau dibayarkan. Fokus pengukurannya pada saldo kas, dengan cara membedakan antara kas yang diterima dan kas yang dikeluarkan. Lingkup akuntansi berbasis kas meliputi saldo kas dan pengeluaran kas. Lebih lanjut Bastian menjelaskan karakteristik dari basis kas antara lain sebagai berikut:

1. Mengukur aliran sumber kas
2. Transaksi keuangan diakui pada saat uang diterima/dibayarkan
3. Menunjukkan ketaatan pada batas anggaran belanja (*spending limit*) dan pada peraturan lain

4. Menghasilkan laporan yang kurang komprehensif bagi pengambilan keputusan

2.3.1.2 Akuntansi Berbasis Akrua

Akuntansi akrual mengakui dan mencatat transaksi dan kejadian keuangan pada saat terjadi atau pada saat perolehan, Bastian (2009). Khan dan Mayes (2009) mengartikan akuntansi akrual sebagai metodologi dalam akuntansi dimana transaksi diakui berdasarkan aktivitas ekonomi bukan pada saat kas diterima atau dikeluarkan. Mengikuti metode ini, maka pendapatan akan diterima ketika pekerjaan telah diselesaikan dan beban akan diakui sebagai hutang ketika sumber daya telah digunakan.

2.3.1.3 Kelebihan dan Kekurangan Basis Akrua

Akuntansi akrual dianggap lebih baik daripada akuntansi kas Mardiasmo (2009). Teknik akuntansi berbasis akrual diyakini dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih dipercaya, lebih akurat, komprehensif, dan relevan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik. Menurut Bastian (2009), keuntungan basis akrual dapat diperinci sebagai berikut :

1. Penerimaan dan pengeluaran dalam laporan operasional berhubungan dengan penerimaan dan pemasukannya, yang berarti bahwa basis akrual memberikan alat ukur untuk barang dan jasa yang dikonsumsi, diubah, dan diperoleh.
2. Basis akrual menunjukkan gambaran pendapatan pendapatan. Perubahan harga, pendapatan yang diperoleh dalam basis akrual, dan besarnya biaya historis adalah alat ukur kinerja yang dapat diterima.
3. Basis akrual dapat dijadikan sebagai alat ukur modal. Di samping itu, basis akrual digunakan untuk mencatat *revenue* ketika diperoleh dan biaya pada saat terjadi. Dengan kata lain, biaya dicatat ketika hutang tanpa memandang kapan pembayaran dilakukan.

Dari beberapa uraian diatas kita dapat menarik kesimpulan bahwa basis akrual akan mengakui transaksi ekonomi tidak didasarkan diterima atau dikeluarkannya

uang tetapi ketika terjadi perubahan posisi keuangan perusahaan yang ditandai dengan adanya aliran masuk atau keluar manfaat ekonomi. Jadi basis akrual akan memberikan informasi yang lebih akurat dan mencatat transaksi sesuai waktunya sehingga konsep periodisasi dapat terpenuhi.

Menurut Bastian (2009), beberapa masalah aplikasi basis akrual yang dapat diidentifikasi antara lain :

1. Penentuan pos dan besaran transaksi yang dicatat dalam jurnal dilakukan oleh individu yang mencatat.
2. Relevansi akuntansi akrual menjadi terbatas ketika dikaitkan dengan nilai historis dan inflasi.
3. Dalam perbandingan dengan basis kas, penyesuaian akrual membutuhkan prosedur administrasi yang lebih rumit, sehingga biaya administrasi menjadi lebih mahal.
4. Peluang manipulasi keuangan yang sulit dikendalikan.

2.4 Persepsi

2.4.1 Pengertian Persepsi

Pengertian persepsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu atau merupakan proses seseorang mengetahui beberapa hal yang dialami oleh setiap orang dalam memahami setiap informasi tentang lingkungan melalui panca indera.

Pembentukan proses persepsi masing-masing individu berbeda-beda. Seseorang akan mempertahankan bias atau pengharapan yang dimilikinya yang dapat mempengaruhi kesan individu tersebut. Dengan adanya kesan tersebut, maka menunjukkan adanya perbedaan dalam hal seberapa banyak seseorang akan mempertimbangkan informasi yang masuk. Karena dengan kesan seseorang terhadap orang lain itulah yang kelak akan memberikan bentuk pada perilaku individu tersebut.

Persepsi didefinisikan sebagai suatu proses yang menggabungkan dan mengorganisir data-data indera kita (penginderaan) untuk dikembangkan

sedemikian rupa sehingga kita dapat menyadari di sekeliling kita, termasuk sadar akan diri kita sendiri (Shaleh, 2009)

Menurut kamus lengkap psikologi (Chaplin, 2014), persepsi adalah :

1. Proses mengetahui atau mengenali objek dan kejadian objektif dengan bantuan indera
2. Kesadaran dari proses-proses organis
3. (*Titchener*) satu kelompok penginderaan dengan penambahan arti-arti k berasal dari pengalaman di masa lalu.
4. Variabel yang meghalangi atau ikut campur tangan, berasal dari kemampuan organiasi untuk melakukan pembedaan diantara perangsang-perangsang.
5. Kesadaran intuitif mengenai kebenaran langsung atau keyakinan yang serta merta mengenai sesuatu

Persepsi adalah proses pengolahan informasi dari lingkungan yang berupa stimulus, yang diterima melalui alat indera dan diteruskan ke otak untuk diseleksi, diorganisasikan sehingga menimbulkan penafsiran atau penginterpretasian yang berupa penilaian dari penginderaan atau pengalaman sebelumnya. Persepsi merupakan hasil interaksi antara dunia luar individu (lingkungan) dengan pengalaman individu yang sudah diinternalisasi dengan sistem sensorik alat indera sebagai penghubung, dan diinterpretasikan oleh sistem syaraf di otak.

2.4.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi Persepsi

Persepsi merupakan pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi juga tergantung pada ruang dan waktu. Berubahnya dimensi ruang dan waktu dakan mengubah bentuk persepsi dari asalnya. Maka dapat disimpulkan terdapat faktor-faktor yang akan mempengaruhi terbentuknya persepsi seseorang.

Pada dasarnya dibagi menjadi 2 yaitu Faktor Internal dan Faktor Eksternal.

1. Faktor Internal yang mempengaruhi persepsi, yaitu faktor-faktor yang terdapat dalam diri individu, yang mencakup beberapa hal antara lain :

- a. Fisiologis. Informasi masuk melalui alat indera, selanjutnya informasi yang diperoleh ini akan mempengaruhi dan melengkapi usaha untuk memberikan arti terhadap lingkungan sekitarnya. Kapasitas indera untuk mempersepsi pada tiap orang berbeda-beda sehingga interpretasi terhadap lingkungan juga dapat berbeda.
 - b. Perhatian. Individu memerlukan sejumlah energi yang dikeluarkan untuk memperhatikan atau memfokuskan pada bentuk fisik dan fasilitas mental yang ada pada suatu obyek. Energi tiap orang berbeda-beda sehingga perhatian seseorang terhadap obyek juga berbeda dan hal ini akan mempengaruhi persepsi terhadap suatu obyek.
 - c. Minat. Persepsi terhadap suatu obyek bervariasi tergantung pada seberapa banyak energi atau *perpetual vigilance* yang digerakkan untuk mempersepsi. *Perpetual vigilance* merupakan kecenderungan seseorang untuk memperhatikan tipe tertentu dari stimulus atau dapat dikatakan sebagai minat.
 - d. Kebutuhan yang searah. Faktor ini dapat dilihat dari bagaimana kuatnya seseorang individu mencari obyek-obyek atau pesan yang dapat memberikan jawaban sesuai dengan dirinya.
 - e. Pengalaman dan ingatan. Pengalaman dapat dikatakan tergantung pada ingatan dalam arti sejauh mana seseorang dapat mengingat kejadian-kejadian lampau untuk mengetahui suatu rangsang dalam pengertian luas.
 - f. Suasana hati. Keadaan emosi mempengaruhi perilaku seseorang, *mood* ini menunjukkan bagaimana perasaan seseorang pada waktu yang dapat mempengaruhi bagaimana seseorang dalam menerima, bereaksi dan mengingat.
2. Faktor Eksternal yang mempengaruhi persepsi, merupakan karakteristik dari lingkungan dan obyek-obyek yang terlibat didalamnya. Elemen-elemen tersebut dapat mengubah sudut pandang seseorang terhadap dunia sekitarnya dan mempengaruhi bagaimana seseorang merasakan atau menerimanya. Sementara itu faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi persepsi adalah :

- a. Ukuran dan penempatan dari obyek atau stimulus. Faktor ini menyatakan bahwa semakin besarnya hubungan suatu obyek, maka semakin mudah untuk dipahami. Bentuk ini akan mempengaruhi persepsi individu dan dengan melihat bentuk ukuran suatu obyek individu akan mudah untuk perhatian pada gilirannya membentuk persepsi.
- b. Warna dari obyek-obyek. Obyek-obyek yang mempunyai cahaya lebih banyak, akan lebih mudah dipahami (*to be perceived*) dibandingkan dengan yang sedikit.
- c. Keunikan dan kekontrasan stimulus. Stimulus luar yang penampilannya dengan latar belakang sekelilingnya yang sama sekali diluar sangkaan individu yang lain akan banyak menarik perhatian.
- d. Intensitas dan kekuatan dari stimulus. Stimulus dari luar akan memberi makna lebih bila lebih sering diperhatikan dibandingkan dengan yang hanya sekali dilihat. Kekuatan dari stimulus merupakan daya dari suatu obyek yang bisa mempengaruhi persepsi.
- e. *Motion* atau gerakan. Individu akan banyak memberikan perhatian terhadap obyek yang memberikan gerakan dalam jangkauan pandangan dibandingkan obyek yang diam.

Sedangkan untuk menentukan bagaimana menilai (metode penelitian). Ada dua alternatif dasar, yang pertama adalah dengan meranking hasil persepsi pegawai pemerintah daerah dari yang terbaik hingga terburuk. Kelebihan metode ranking terletak pada kepraktisannya terutama dalam penggunaannya karena penilai tidak perlu menilai per kriteria penilaian untuk mengetahui nilai keseluruhan. Tetapi permasalahannya adalah penilai dapat mengalami kesulitan untuk mempertanggungjawabkan ranking yang ia susun.

Alternatif kedua adalah menggunakan skala dimana setiap individu dinilai per kriteria dengan memilih satu angka dari skala, misalnya 1 sampai dengan 5 (1=sangat tidak setuju, 5=sangat setuju). Angka-angka yang didapatkan dari skala kemudian dijumlahkan untuk mendapatkan nilai keseluruhan untuk masing-masing individu. Dengan skala, penilai dapat mempertanggungjawabkan nilai keseluruhan yang telah ia berikan untuk masing-masing individu. Namun demikian, tidaklah mudah merancang sistem penilaian dengan metode skala

karena kriteria dan skala penilaian harus didefinisikan secara jelas. Dengan kata lain, penilaian dengan skala lebih memakan waktu mengingat penilaian dilakukan per kriteria.

2.5 Akuntabilitas

Fenomena yang terjadi dalam perkembangan sektor publik di Indonesia dewasa ini adalah semakin menguatnya tuntutan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga publik, baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pada dasarnya akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan pengungkapan (*disclosure*) atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah daerah kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, harus bisa menjadi subyek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik, yaitu hak untuk tahu (*right to know*), hak untuk diberi informasi (*right to be informed*), dan hak untuk didengar aspirasinya (*right to be heard and to be listened*). Akuntansi sektor publik memiliki peran yang sangat vital dalam memberikan informasi dan *disclosure* atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah daerah untuk memfasilitasi terciptanya transparansi dan akuntabilitas publik.

Akuntabilitas menyaratkan bahwa pengambilan keputusan berperilaku sesuai dengan mandat yang diterimanya. Untuk itu, perumusan kebijakan, bersama-sama dengan cara hasil kebijakan tersebut harus dapat diakses dan dikomunikasikan secara vertikal maupun horizontal dengan baik.

Akuntabilitas menurut PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan adalah :

“Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik”

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian akuntabilitas adalah wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat yang menyaratkan bahwa pengambil keputusan berperilaku sesuai dengan peraturan perundangan yang

berlaku dan mandat yang diterimanya, serta tetap memperhatikan pengguna sumber daya secara bijaksana, efisien, efektif, dan ekonomis.

Tuntutan dilaksanakannya akuntabilitas publik mengharuskan pemerintah daerah untuk memperbaiki sistem pencatatan dan pelaporan. Pemerintah daerah dituntut untuk tidak sekedar melakukan *vertical reporting*, yaitu pelaporan kepada pemerintah atasan termasuk pemerintah pusat), akan tetapi juga melakukan *horizontal reporting*, yaitu pelaporan kinerja pemerintah daerah kepada DPRD dan masyarakat luas sebagai bentuk *horizontal accountability*. Salah satu tujuan reformasi pengelolaan keuangan daerah adalah mengubah pola pertanggungjawaban vertikal menjadi pola pertanggungjawaban horizontal.

Dikeluarkannya PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah telah melahirkan paradigma baru dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Dalam pengelolaan keuangan daerah, paradigma baru tersebut berupa tuntutan dilakukannya pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi (*public oriented*). Untuk itu, pemerintah daerah dituntut untuk dapat membuat laporan keuangan dan menyampaikan informasi keuangan tersebut secara transparan kepada publik.

Adanya penerapan sistem pencatatan *Accrual Basis* ini, sangat berpengaruh terhadap akuntabilitas daerah baik secara internal maupun eksternal. Karena hal ini merupakan wujud dari pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada masyarakat yang berupa pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan berdasarkan manajemen keuangan yang sehat diikuti dengan sistem pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehingga keterbukaan pemerintah bagi masyarakat yang ingin bersama-sama berinteraksi langsung dalam mengontrol setiap kebijakan pemerintah yang terkait dengan pendayagunaan keuangan daerah dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, sistem akuntansi keuangan daerah sebagai bagian dari akuntansi sektor publik. Hal ini karena pemerintah merupakan salah satu bagian dari organisasi sektor publik. Sedangkan akuntansi sektor publik seharusnya

menjalankan akuntabilitasnya terhadap publik melalui akuntansi (Projohardjono, 2000 dalam Auliana 2013).

Pemerintah sebagai organisasi sektor publik mempunyai kewajiban untuk menyajikan informasi keuangan kepada seluruh *stakeholder*. Hal ini perlu dilakukan sebagai perwujudan transparansi pengelolaan keuangan (*good goverment governance*) yang bertujuan untuk menciptakan *well-informed society*, dan pada akhirnya akan tercipta akuntabilitas publik. (Rasuli, 2001 dalam Auliana, 2013)

2.6 Kinerja Pegawai

2.6.1 Definisi Kinerja

Mangkunegara (2011:67) dalam Adniaty (2013) juga menyatakan kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Pegawai adalah orang yang melakukan pekerjaan dengan mendapatkan imbalan jasa berupa gaji dan tunjangan dari pemerintah. Pegawai inilah yang mengerjakan segala pekerjaan atau kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Kriteria yang sering dinilai selama proses penilaian kinerja adalah kuantitas dan kualitas.

Kinerja pegawai dapat diartikan sebagai gambaran atas pencapaian segala aktivitas yang dilakukan oleh pegawai dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi instansi. Kinerja pegawai merupakan landasan yang kuat bagi organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Semakin tinggi kinerja pegawai maka akan semakin tinggi kinerja organisasi (Pangestika, 2016).

Pada pasal 2 Undang-undang Pokok Kepegawaian No. 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan UU No. 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian dijelaskan pengertian pegawai negeri sipil pemerintah daerah adalah pegawai yang diangkat dan bekerja pada pemerintah daerah otonom baik pada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota. Peningkatan kinerja pegawai dalam suatu organisasi sangat diperlukan agar tujuan yang diinginkan oleh organisasi dapat direalisasikan dengan baik. Kinerja suatu organisasi akan meningkat apabila

terdapat kerjasama dan hubungan yang baik antara pimpinan dan pegawainya. Dengan meningkatkan kinerja pegawai akan meningkatkan kinerja perusahaan. (Adniaty, 2013)

2.6.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Pegawai

Menurut Timple (2001:31) dalam Pangestika (2016) terdapat dua faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor-faktor yang berhubungan dengan sifat seseorang individu meliputi sikap, kepribadian, fisik, jenis kelamin, pemahaman, pendidikan, pengalaman kerja, dan latar belakang budaya.

Sementara faktor eksternal merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi pegawai yang berasal dari lingkungan, meliputi kebijakan organisasi, kepemimpinan, tindakan-tindakan rekan kerja, pengawasan, sistem upah, dan lingkungan sosial.

Menurut Gibson (tanpa tahun) dalam Yulius (2014) menyatakan bahwa terdapat tiga faktor yang mempengaruhi kinerja seseorang yaitu diantaranya :

1. Faktor individu merupakan kapasitas yang melekat pada pribadi karyawan dan kualitas diri karyawan serta hal-hal yang melatar belakangi karyawan itu sendiri. Beberapa sub dari faktor individu adalah sebagai berikut :
 - a. Kemampuan adalah kecakapan atau potensi seseorang individu untuk menguasai keahlian, baik melakukan atau mengerjakan beragam tugas dalam suatu pekerjaan atau suatu penilaian atas tindakan seseorang.
 - b. Keterampilan adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan akal, fikiran, ide dan kreatifitasnya dalam mengerjakan, mengubah, menyelesaikan ataupun membuat sesuatu menjadi lebih bermakna sehingga menghasilkan sebuah nilai dari hasil pekerjaan tersebut.
 - c. Pengalam kerja adalah tingkat penguasaan pengetahuan serta keterampilan seseorang dalam pekerjaannya yang dapat diukur dari masa kerja dan dari tingkat pengetahuan serta keterampilan yang dimilikinya.
 - d. Demografi seseorang adalah ilmu yang mempelajari dinamika kependudukan, meliputi ukuran, struktur, dan distribusi penduduk, serta

bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan.

2. Faktor psikologis merupakan ilmu mengadaptasikan jiwa atau target persentuhan dan penyatuan pribadi, penerimaan seseorang terhadap diri sendiri dan penerimaan orang lain terhadap dirinya yang kesemuanya itu bermuara kepada perasaan bahagia dan kesenangan jiwa. Beberapa sub dari faktor psikologis adalah sebagai berikut :
 - a. Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan.
 - b. Peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun secara informal.
 - c. Sikap adalah efek/penilaian positif atau negative terhadap suatu objek.
 - d. Kepribadian adalah keseluruhan sikap, perasaan, ekspresi, dan tempramen seseorang.
 - e. Motivasi adalah suatu dorongan kehendak yang menyebabkan seseorang melakukan suatu perbuatan untuk mencapai tujuan tertentu.
 - f. Kepuasan kerja merupakan suatu sikap umum terhadap pekerjaan seseorang, selisih antara banyaknya ganjaran yang diterima seseorang pegawai dan banyaknya yang mereka yakini apa yang seharusnya mereka terima.
3. Faktor organisasi merupakan suatu kelompok orang yang memiliki tujuan yang sama dan pembagian kerja yang tetap. Beberapa sub dari faktor organisasi :
 - a. Struktur organisasi adalah susunan komponen-komponen (unit-unit kerja) dalam organisasi. Struktur organisasi menunjukkan adanya pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan-kegiatan yang berbeda-beda tersebut diintegrasikan (koordinasi)

- b. *Job design* adalah fungsi penetapan kegiatan-kegiatan kerja seorang individu atau kelompok karyawan secara organisasional.
- c. Kepemimpinan yaitu kegiatan atau seni mempengaruhi orang lain agar mau bekerjasama yang didasarkan pada kemampuan orang tersebut untuk membimbing orang lain dalam mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan kelompok.
- d. Sistem penghargaan (*reward system*) adalah semua yang dihargai dan diinginkan sumber daya manusia yang mampu dan mau diberikan perusahaan sebagai ganti atas kontribusi yang diberikan sumber daya manusia tersebut.

2.7 Penelitian Terdahulu

Berikut adalah penelitian-penelitian terdahulu beserta hasil yang dapat dijelaskan pada tabel 2.1 di bawah ini :

Tabel 2.1
Tinjauan Penelitian Terdahulu

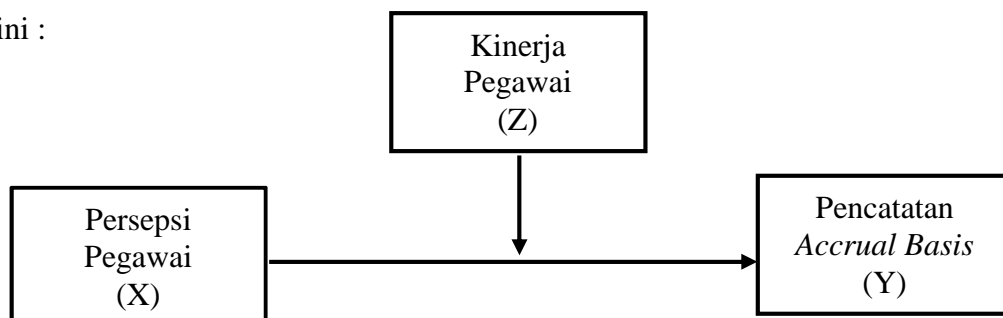
Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
Auliana (2013)	Pengaruh Persepsi Pegawai Pemerintah terhadap Sistem Pencatatan <i>Double Entry</i> untuk meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pegawai Pemerintah Kota Bandar Lampung	- Persepsi Pegawai Pemerintah - Sistem Pencatatan <i>Double Entry</i>	Persepsi Pegawai Pemerintah berpengaruh positif terhadap Sistem Pencatatan <i>Double Entry</i> untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Bandar Lampung

Adniaty (2013)	Pengaruh motivasi dan disiplin kerja terhadap kinerja pegawai pada kantor dinas pendapatan daerah provinsi Sumatera Utara upt. Binjai	<ul style="list-style-type: none"> - Kinerja pegawai dinas pendapatan daerah - Motivasi - Disiplin kerja 	<ul style="list-style-type: none"> - Motivasi berpengaruh secara positif dan tiudak signifikan terhadap kinerja pegawai. - Disiplin kerja berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai.
Kusuma (2013)	Analisis Kesiapan Pemerintah dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pemerintahan Kabupaten Jember	<ul style="list-style-type: none"> - Komitmen - SDM - Sarana Prasarana - Sistem Informasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Menunjukkan bahwa integritas dan kesiapan SDM adalah dalam kategori siap. - Kesiapan Sistem Informasi dan Sarana Prasarana adalah dalam kategori cukup siap.
Azwan (2015)	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual : Sebuah Analisis Deskriptif	<ul style="list-style-type: none"> - Sumber Daya Manusia - Ketersediaan Sistem Infomasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Menunjukkan kualitas SDM berada dalam Kategori Siap - Ketersediaan Sistem Infomasi dalam kategori siap
Pangestika (2016)	Pengaruh pengendalian	<ul style="list-style-type: none"> - Kinerja pegawai 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengendalian internal berpengaruh

	<p>internal, <i>good governance</i> dan komitmen organisasi terhadap kinerja pegawai bidang keuangan pemerintah daerah kabupaten Temanggung</p>	<p>bidang keuangan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengendalian internal - <i>Good governance</i> - Komitmen organisasi 	<p>positif terhadap kinerja pegawai bidang keuangan pemerintah daerah kabupaten Temanggung.</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Good governance</i> berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai bidang keuangan pemerintah daerah kabupaten Temanggung. - Komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai bidang keuangan pemerintahan daerah kabupaten Temanggung.
--	---	---	---

2.8 Kerangka Pemikiran

Pengaruh Persepsi Pegawai Pemerintah Daerah terhadap Sistem Pencatatan *Accrual Basis* dapat dilihat dalam kerangka pemikiran pada gambar 2.1 di bawah ini :



Gambar 2.1 : Kerangka Pemikiran

2.9 Bangunan Hipotesis

2.9.1 Pengaruh Persepsi Pegawai Pemerintah Daerah terhadap Sistem Pencatatan *Accrual Basis*

Dengan dicetuskannya PP No. 71 Tahun 2010, maka sudah menjadi kewajiban bagi seluruh organisasi pemerintahan untuk menerapkan basis akrual. Berdasarkan Pasal 36, ayat 1 UU No. 17 di sebutkan :

Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya dalam lima tahun. Selama pengakuan dan pendapatan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas.

Namun karena pemerintah belum sanggup merealisasikan dalam lima tahun pertama yakni pada tahun 2008, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk perpanjangan waktu, yaitu lima tahun lagi hingga tahun 2015, terhitung sejak dikeluarkan PP No. 71 Tahun 2010.

Untuk menerapkan akrual basis, diperlukan komitmen dari pimpinan yang selanjutnya komitmen tersebut harus ditransferkan ke seluruh pelaksana. Bukti adanya komitmen pimpinan dan pemahaman para pelaksana tersebut diekspresikan dengan membangun infrastruktur yang dapat menunjang implementasi basis akrual. Bagi Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) 2014, infrastruktur tersebut sebaiknya dapat menyediakan informasi berupa sebagai berikut :

1. Informasi yang dapat memberikan pemahaman terhadap posisi dan eksistensi entitas pemerintahan.
2. Informasi yang dapat memberikan pemahaman atas transaksi keuangan yang dilakukan dana tau melibatkan entitas pemerintahan.
3. Informasi mengenai waktu terjadinya transaksi.
4. Informasi yang dapat memberikan instrumen untuk mengukur asersi penilaian atas transaksi tersebut.

Hasil penelitian mengenai persepsi pegawai terhadap sistem pencatatan, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Auliana (2013) yang menyatakan bahwa persepsi

pegawai berpengaruh terhadap sistem pencatatan. Namun pada Tahun 2013, objek yang diteliti Auliana (2013) masih menggunakan sistem Pencatatan *Double Entry*. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dihipotesiskan :

H₁ : Terdapat pengaruh persepsi pegawai pemerintah daerah terhadap sistem pencatatan *accrual basis* untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja pegawai pemerintah daerah.